

Intervensi SDGs Terhadap Penanganan Kemiskinan Nelayan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

SDGs intervention in handling fishermen poverty during the Covid-19 pandemic in Makassar City

Muhammad Iqbal Latief^{1✉}, Hasbi¹, Sultan¹, Arsyad Genda¹, Pasmudir¹

¹Departemen Sosiologi FISIP, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245

✉Corresponding author: muhilberkelana@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan bagi masyarakat nelayan yang bermukim di pesisir pantai dan pulau-pulau kota Makassar, masih menjadi patologi sosial yang belum bisa diselesaikan. Ironisnya, kemiskinan tersebut bertambah parah dengan pandemi Covid-19. Kesulitan hidup makin nyata, karena pendapatan sangat berkurang sementara biaya melaut makin meningkat. Di kota Makassar angka kemiskinan meningkat drastis dari 4,1 persen menjadi 7,2 persen selama tahun 2020 (Data Depsos Makassar). Salah satu upaya mengatasinya, melalui pendekatan intervensi SDGs (*Sustainable Development Goals*). Karena itu, tulisan ini berupaya menggambarkan intervensi SDGs dalam penanganan kemiskinan masyarakat nelayan di masa pandemi Covid-19 di kota Makassar dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan data yang diolah yaitu data sekunder dan data primer. Penelitian ini berawal identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data meliputi klasifikasi dan reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa, penerapan SDGs sebagai strategi intervensi penanganan kemiskinan masih belum efektif, karena; (1) Masih banyak nelayan yang belum paham tentang program SDGs dalam mengembangkan ekonominya; (2) Program SDGs masih sangat terbatas implementasinya karena terkendala kebijakan. Sebagai saran, perlu dilakukan sosialisasi yang massif dan intensif terhadap kebijakan, program dan pelaksanaan SDGs di masyarakat nelayan. Selain itu, perlu dibangun kelembagaan yang efektif menangani pelaksanaan SDGs pada masyarakat nelayan di kota Makassar.

Kata kunci: intervensi, SDGs, kemiskinan, nelayan, Makassar

Pendahuluan :

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks, namun memiliki implikasi sosial yang sangat serius. Bahkan dalam terminologi sosiologi, kemiskinan menjadi patologi sosial yang dapat menjalar ke berbagai dimensi kehidupan yang cenderung bersifat negatif. Kemiskinan dapat menyebabkan angka kriminalitas dalam masyarakat meningkat, begitu juga dengan tindakan asusila lainnya. Inilah yang menyebabkan, kemiskinan selalu dianggap sebagai penyakit sosial yang harus dikurangi bahkan dihilangkan.

Sekarang ini, isu mengenai kemiskinan sudah mengglobal dengan hadirnya kesepakatan MDGs (*Millenium Development Goals*) yang kemudian pada tahun 2015 yang lalu diperbaharui menjadi kesepakatan SDGs (*Sustainability Development Goals*) yang menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai isu nomor satu dari 17 (tujuh belas) isu yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Menurut data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), masih terdapat 18 % (persen) penduduk dunia yang berada pada garis kemiskinan. Artinya, dari kurang lebih 7 miliar penduduk dunia maka terdapat kurang lebih 1,2 miliar warga dunia yang miskin. (Data PBB tahun 2019).

Hal ini tentu menjadi masalah serius, termasuk yang dialami oleh Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan Pemerintah sejak orde lama, orde baru sampai orde reformasi, belum mampu

mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia secara signifikan. Bahkan di era orde baru, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat sangat jelas terlihat sehingga banyak slogan yang mengatakan pembangunan ekonomi di orde baru menghasilkan " yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin ". Di era reformasi (sejak tahun 1999 sampai sekarang ini) pun, kondisi kemiskinan di Indonesia belum beranjak ke arah yang lebih baik. Yang ironis sekarang ini, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembasmian kemiskinan yang sangat besar tiap tahun, namun angka kemiskinannya tidak turun secara signifikan.

Di era reformasi, anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang dialokasikan pada APBN setiap tahunnya meningkat secara signifikan namun realisasi penurunan angka kemiskinan masih sangat minim. Menurut Data BPS (tahun 2019) telah dipublikasi secara umum, mengindikasikan bahwa angka penurunan kemiskinan di Indonesia tidaklah menggembirakan. Artinya, dengan jumlah alokasi anggaran yang meningkat signifikan setiap tahun (rata-rata mencapai di atas 20 % peningkatan anggaran per tahun) dibanding dengan penurunan angka kemiskinan yang hanya 0,53 % rata-rata setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang meningkat setiap tahun tidak berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Indonesia. Kondisi kemiskinan ini, makin diperparah dengan hadirnya wabah pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 sampai sekarang ini. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) per September 2020, jumlah orang miskin di Indonesia, meningkat pada tahun 2021 menjadi 27,55 juta atau 10,19 % dari total jumlah penduduk atau meningkat 2,76 juta jiwa dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin selama pandemi, karena penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat namun masyarakat yang berada di lapisan bawah terdampak lebih dalam dibanding lapisan atas.

Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan, masih menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia, apalagi kalau melihat struktur masyarakat Indonesia yang masih dominan di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Apalagi Indonesia merupakan negara maritim dan tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta km². Ada sekitar 60 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan penyumbang sekitar 22 % dari pendapatan brutto nasional. Tak bisa dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural. Secara alamiah laut memang sulit diperidiksi. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit. Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural. Kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, dan keterbatasan teknologi. Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara yang berekonomi lemah, kontras dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Kekayaan alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal ini menegaskan, bahwa sebenarnya kemiskinan yang terparah di Indonesia ada di wilayah pedesaan dan lebih khusus lagi di wilayah desa pantai termasuk pulau-pulau terluar, daerah pesisir pantai dan pulau-pulau perbatasan dengan negara lain.

Fenomena kemiskinan Indonesia, juga sangat mewarnai kondisi kemiskinan di provinsi dan kota. Fenomena yang terjadi secara nasional, juga tampak pada kondisi provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi kemiskinan di Sulsel, juga mengalami kenaikan selama masa pandemic covid-19. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (data September 2020) menjelaskan bahwa jumlah orang miskin di Sulsel selama pandemi mencapai 800.240 orang atau terjadi peningkatan sebesar 40.660 orang miskin dibanding tahun 2019. Hal ini menegaskan bahwa telah terjadi persentasi kenaikan jumlah orang miskin sebesar 0,43 % selama periode September 2019 sampai September 2020. Jumlah tersebut terbesar di daerah perkotaan sebanyak 32.69 ribu orang miskin dan di pedesaan mengalami kenaikan 7,91 ribu jiwa. Meningkatnya jumlah orang miskin di Sulsel, karena karena faktor pandemi Covid-19, juga karena banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPS) juga makin besar. Hal ini yang menyebabkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga.

Hal ini juga terjadi di kota Makassar, bahkan akibat dari pandemi Covid-19 kemiskinan di kota Makassar meningkat sangat signifikan dari 4,4 % pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,4 % pada tahun 2020. Selama masa pandemi, angka kemiskinan di kota Makassar mencapai 154.632 keluarga pada tahun 2020, meningkat sebesar 72.306 keluarga dibanding tahun 2019 yang keluarga miskin mencapai 82.326 keluarga. Jumlah warga miskin yang tinggal di Kawasan pesisir terbanyak di kecamatan Ujung Tanah 11,14 %,

Sebenarnya sudah banyak pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Seperti halnya BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan objective and subjective. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Sedangkan pendekatan pendapatan, melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Demikian pula pendekatan kemampuan dasar yang menilai bahwa kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan lainnya Pendekatan hak melihat bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum

antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Selain itu, ada juga pendekatan lain yang digunakan dalam studi tentang kemiskinan yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif yaitu pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditentukan oleh pihak lain terutama para ahli yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan standart kehidupan, sedangkan pendekatan subyektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang ditentukan oleh orang miskin itu sendiri yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial dari orang miskin dibandingkan dengan orang kaya yang ada dilingkungannya. Seperti diungkapkan oleh Joseph F. Stepanek, ed. (1985) bahwa pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan obyektif banyak ditemukan berbagai dimensi pendekatan yang digunakan oleh para ahli maupun lembaga.

Dalam perspektif yang lain, terdapat tiga pendekatan yang bisa dipakai untuk melihat persoalan kemiskinan. Pertama, **pendekatan tradisional**. Pengikut pendekatan ini masih percaya bahwa kemiskinan umat pada hakekatnya adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu apa arti dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Dalam pandangan mereka, kemiskinan justru ditempatkan sebagai ujian atas keimanan seseorang. Akar teologis paradigma ini bersandar pada konsep Sunni mengenai takdir (*predeterminisme*), yakni ketentuan dan rencana Tuhan yang jauh diciptakan sebelum diciptakannya alam. Dalam pandangan mereka, manusia tidak memiliki *free will* untuk menciptakan sejarah mereka sendiri. Meskipun manusia didorong untuk berusaha, akhirnya Tuhan jualah yang menentukannya. Demikian juga dalam masalah kemiskinan, sekuat apapun usaha yang dilakukan manusia, jika Tuhan belum menghendaki, maka ia akan tetap miskin.

Kedua, **pendekatan modernis**. Para pemikir pendekatan ini menyebut bahwa kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia pada dasarnya lebih disebabkan oleh cara berpikir, mental dan budaya mereka yang salah. Hilangnya kepercayaan diri untuk menghadapi masa depan, adalah kata kunci yang selalu membuat orang tidak berani berspekulasi untuk merubah diri, termasuk keluar dari kungkungan kemiskinan. Bagi kelompok ini, manusia sepenuhnya mempunyai kesempatan untuk merubah diri. Jika faktor yang mendorong kemiskinan adalah rasa malas, tak kreatif, tak kompetitif, tak tekun dan tak disiplin, maka itu menjadi tanggung jawab individual yang jalan pemecahannya bisa melalui pendidikan, pembinaan, training dan lainnya. Tetapi jika penyebab kemiskinan berada di luar diri orang miskin seperti adanya penindasan, penghisapan dan eksploitasi yang terstruktur, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perubahan sosial yang radikal. Diberlakukannya pasar bebas misalnya, harus disikapi dengan mempersiapkan masyarakat yang handal, ulet, kompetitif dan mandiri, yang tidak

lagi bergantung pada struktur sosial dan teologi yang menindas. jika perlu seluruh masyarakat Indonesia harus disiapkan menjadi liberal supaya bisa bersaing dalam globalisasi.

Ketiga, **pendekatan strukturalis**. Pengikut kelompok ini menganggap bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia terjadi akibat munculnya struktur sosial dalam negara yang menindas, sistem politik yang represif, sistem sosio-budaya yang dominatif, yang diciptakan demi keuntungan elite penguasa, serta sistem ekonomi yang eksploitatif. Ada dua ciri khas dari kemiskinan struktural ini, yaitu: a). Kesenjangan sosial yang lebar antara kelompok kaya dengan mayoritas masyarakat miskin, dan b). lambannya mobilitas sosial akibat kungkungan struktur yang ada. Pendeknya, kemiskinan struktural merupakan kemiskinan masif yang dialami mayoritas masyarakat akibat struktur yang tidak adil, yang hanya menguntungkan elite tertentu. Ketiga pendekatan tersebut sejatinya merupakan perangkat untuk melakukan diagnosa terhadap problem kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sherraden (2006) mengelompokkan kemiskinan ke dalam dua kategori yang saling bertentangan yaitu teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu (*behavioral*) dan teori yang mengarah pada struktur sosial. Selain itu juga ada satu kelompok teori yang tidak memihak di anantara keduanya (*middle ground*), yaitu teori mengenai budaya miskin.

Di tengah makin meluasnya pandemi Covid-19 di masyarakat, maka Pemerintah juga mencoba menformulasikan sejumlah pendekatan untuk mencegah makin banyaknya masyarakat yang menjadi miskin akibat wabah virus corona tersebut, Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mengintrodusir kebijakan dan program SDGs desa. Salah satu upaya akseleratif yang dilaksanakan Pemerintah adalah dengan mengintrodusir kebijakan dan program SDGs (*Sustainability Development Goals*) desa, yaitu suatu format kebijakan yang mengadopsi konsep SDGs Global (Dunia) dan SDGs nasional. Pemerintah melalui Kemendes menurunkan SDGs nasional menjadi SDGs desa berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Rp 72 triliun dana desa tahun 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan SDGs desa. SDGs desa diharapkan menjadi acuan untuk pembangunan desa 2020-2024. SDGs desa adalah pembanguna total atas desa yang mencakup seluruh sendiri kehidupan di desa yang berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal. Salah satu cirikhas dari SDGs desa karena mempertimbangkan faktor kearifan lokal yang tidak dipertimbangkan pada SDGs global dan SDGs nasional. Fokus SDGs desa adalah pada aspek pemulihan ekonom nasional, pengembangan desa wisata dan penguatan ketahanan pangan, dan adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman Covid-19.

Bagaimana pelaksanaan SDGs desa di kota Makassar khususnya masyarakat nelayan yang bermukim di pulau-pulau dan pesisir pantai ? Dan bagaimana intervensi SDGs dalam mengurangi angka kemiskinan di masyarakat nelayan? Tulisan ini berupaya untuk menggambarkan dua pertanyaan yang diajukan tadi.

Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan intervensi SDGs dalam penanganan dan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat nelayan yang bermukim di pulau-pulau dan pesisir pantai di kota Makassar. Karena itu, tipe penelitian ini bersifat

deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh berdasarkan hasil langsung di lapangan sedangkan data sekunder berdasar penelusuran pustaka dan data-data lain dari instansi serta lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data meliputi klasifikasi dan reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, pembahasan hasil penelitian dan penyusunan laporan Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif ini tidak hanya mendeskripsikan sebuah fakta atau fenomena, tetapi yang lebih penting adalah menjelaskan makna dan menggambarkan fenomena atau fakta sosial yang muncul.

Hasil dan Pembahasan :

Sulawesi Selatan, termasuk 10 besar provinsi yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan) Menurut Kabupaten/kota di Sulsel tahun 2015-2017

Kabupaten/kota	2015	2016	2017
Kepulauan Selayar	16,90	17,21	17,62
Bulukumba	33,36	33,25	33,10
Bantaeng	17,55	17,53	17,91
Jeneponto	53,87	55,32	55,35
Takalar	27,12	27,05	26,99
Gowa	59,47	61,52	62,77
Sinjai	21,99	22,51	22,25
Maros	40,08	39,02	38,50
Pangkajene Kepulauan	53,85	52,86	53,38
Barru	16,10	16,24	16,76
Bone	75,01	75,09	77,13
Soppeng	18,88	19,12	18,76
Wajo	30,08	29,46	29,19
Sidrap	16,03	15,92	15,72
Pinrang	30,51	31,28	31,43
Enrekang	27,60	26,98	26,71
Luwu	48,64	50,58	49,80
Tana Toraja	28,59	28,42	29,18
Luwu Utara	41,89	43,75	44,04
Luwu Timur	19,67	21,08	21,94
Toraja Utara	34,37	33,02	32,85
Kota Makassar	63,24	66,78	68,19
Kota Pare-Pare	8,41	8,02	8,07
Kota Palopo	14,51	15,02	15,44
Sulawesi Selatan	797,72	807,03	813,07

Sumber : Data BPS Kota Makassar, 2017

Dari gambaran data di atas, memperlihatkan bahwa kota Makassar memiliki penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Selatan (termasuk kabupaten Bone). Walaupun data di atas memberi gambaran kemiskinan sampai dengan tahun 2018, namun dengan melihat fenomena yang ada selama kurun waktu tahun 2019 sampai sekarang, makin memperlihatkan bahwa kecenderungan penduduk miskin makin meningkat cukup signifikan apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang mewabah sejak Februari tahun

2020 sampai sekarang ini. Khusus di kota Makassar, selama masa pandemi (sejak Maret sampai sekarang), jumlah masyarakat miskin meningkat tajam. Kalau tahun 2019, angka kemiskinan di Makassar mencapai 4,4 % atau sekitar 82.326 rumah tangga maka pada masa pandemi Covid-19 jumlah orang miskin meningkat 3 % atau sekitar 72.306 rumah tangga sehingga angka kemiskinan di kota Makassar sekarang ini mencapai 154.362 rumah tangga. (sumber: wawancara Kadis Sosial Makassar Mukhtar Tahir di Tribun Timur.com Jumat 15/5-2020 jam 23:51). Tingginya angka kemiskinan baru tersebut, karena ratusan usaha tutup, ribuan karyawan mengalami PHK. Data dari Dinas ketenagakerjaan kota Makassar (tahun 2020), menyebutkan 9.000 tenaga kerja di rumahkan dan 4.732 diantaranya hanya mendapat 20 % gaji selebihnya tanpa upah dan mengalami PHK. Jumlah penduduk laki-laki 755.968 dan perempuan 770.709 sehingga total 1.526.677 tersebar di 15 kecamatan dan 100 kelurahan. Total jumlah penduduk miskin dan rentan di kota Makassar sebesar 228.091 jiwa sedangkan penduduk miskin sebanyak 66.224 (data BPS kota Makassar, 2019).

Kondisi ini juga tampak pada kehidupan masyarakat yang mendiami pulau-pulau dan pesisir pantai di kota Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat miskin yang berada pulau-pulau dan pesisir pantai, tersebar di sejumlah kecamatan di kota Makassar antara lain kecamatan Kep. Singkarrang, Ujung Tanah, Tallo dan Mariso. Selain itu, juga tersebar di pulau Lae-Lae, Barang Lompo, Barang Caddi, Kodingareng Lompi, Kodingareng Keke, Lumu-Lumu, Laikang, Bone Tambu dan beberapa pulau lainnya. Mewabahnya Covid-19 di Kota Makassar yang sampai saat ini sudah mencapai 30.195 pasien yang terkonfirmasi Covid-19 (data Perkembangan Covid-19 di kota Makassar per tanggal 29 Mei 2021). Bahkan berdasar data Covid-19 kota Makassar, persebarannya virus corona ini sudah menjangkau wilayah pulau-pulau dengan ditemukannya 31 warga pulau yang positif Covid-19 (berdasarkan data *real time* Satgas Covid-19 kota Makassar yang dirilis pada tanggal 29 Mei 2021). Memberi dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pulau-pulau, selain karena sudah mulai menyebarnya Covid-19 di wilayah pulau dan pesisir pantai. Juga karena, perekonomian masyarakat pulau makin lesu dan membuat makin banyak yang jatuh miskin.

Walaupun belum ada data dan angka yang pasti mengenai jumlah nelayan di pulau-pulau dan pesisir pantai kota Makassar yang jatuh miskin karena Covid-19, tetapi dengan melihat trend kemiskinan yang terjadi di kota Makassar selama pandemi Covid-19 berlangsung tentu memberi indikasi bahwa masyarakat nelayan pun mengalami pemiskinan. Hasil kajian yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa, makin miskinnya nelayan di pulau-pulau, karena menurunnya jumlah hasil tangkapan ikan, menurunnya harga ikan, biaya operasional melaut makin tinggi, pinjaman dana pihak ketiga yang membengkak, pembatasan sosial selama pandemi dan dampak dari penambangan pasir laut di Makassar. Hal ini semua menjadi indikator bahwa nelayan di pulau-pulau dan pesisir pantai kota Makassar, mengalami dampak sosial ekonomi yang serius dari pandemi Covid-19.

Dalam menilai kemiskinan nelayan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menilai, antara lain; (a) **Kondisi alam**. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi

ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang setiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan setiap tahunnya; **(b) Tingkatan pendidikan nelayan.** Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumberdaya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk pengawetan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi; **(c) Pola kehidupan nelayan sendiri.** Stereotipe semisal boros dan malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kemiskinan nelayan. Padahal kultur nelayan jika dicermati justru memiliki etos kerja yang handal. Bayangkan mereka pergi subuh pulang siang, kemudian menyempatkan waktunya pada waktu senggang untuk memperbaiki jaringan. Memang ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya boros dan hal tersebut menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah.

Dari ketiga indikator ini, memperlihatkan bahwa masalah kondisi alam, tingkat Pendidikan nelayan yang rendah dan pola kehidupan nelayan yang cenderung konsumtif, tampak dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan yang bermukim di pulau-pulau dan pesisir pantai kota Makassar. Sehingga dari waktu ke waktu, nelayan di kota Makassar khususnya yang bermukim di pulau-pulau dan pesisir pantai, tidak memperlihatkan perubahan kehidupan sosial ekonominya secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tesis Primahendra *et. al.* (2001), yang menyatakan bahwa fenomena ekonomi masyarakat miskin ditandai oleh dua karakteristik utama. *Pertama*, skala ekonomi yang berkembang diantara rakyat miskin adalah skala ekonomi mikro. Mereka mendapatkan penghasilan, melakukan transaksi dan melakukan investasi dalam skala mikro. *Kedua*, kehidupan ekonomi mereka diwarnai tingginya risiko dan ketidakamanan sebagai akibat dari jenis aktivitas mereka yang bersifat informal, subsiten dan marjinal.

Pendekatan yang sekarang ini diintrodusir pemerintah yaitu kebijakan mengenai SDGs desa, yang penerapannya dilakukan sejak tahun lalu sampai dengan sekarang ini dengan menggunakan skema penganggaran melalui APBN. Landasan hukum SDGs didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut mengacu pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Karena itu, Perpres No.59 tahun 2019 berfungsi sebagai; (1) peta jalan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan; (2) rencana aksi nasional tujuan pembangunan nasional, dan; (3) rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (Panuluh & Fitri, 2016). Karena itu, pelaksanaan SDGs di Indonesia tidak hanya terpaku pada pemerintah pusat dan daerah saja, namun dibuka Kerjasama kepada seluruh pihak yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan SDGs di Indonesia seperti NGO, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha.

Terkait dengan SDGs sebagai turunan dari SDGs nasional maupun global, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa tersebut, antara lain; (1) desa tanpa kemiskinan; (2) desa tanpa kelaparan; (3) desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan desa berkualitas; (5) desa berkesetaraan gender; (6) desa layak air bersih dan sanitasi; (7) desa yang berenergi bersih dan terbarukan; (8) pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa; (9) inovasi dan infrastruktur desa; (10) desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan; (13) pengendalian dan perubahan iklim oleh desa; (14) ekosistem laut desa; (15) ekosistem daratan desa; (16) desa damai dan berkeadilan; (17) kemitraan untuk pembanguna desa, dan; (18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dilihat dari kebijakan dan indikator pencapaian yang akan dituju, maka SDGs merupakan kebijakan yang mampu menyelesaikan kemiskinan di tingkat desa khususnya bagi masyarakat nelayan di pulau-pulau dan pesisir pantai. Sependapat dengan pandangan Halim Iskandar (2020;12) bahwa SDGs desa merupakan strategi untuk percepatan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Namun sebagai kebijakan baru, SDGs masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, Antara lain; (1) kepedulian masyarakat desa khususnya pulau-pulau tentang kebijakan baru, sangat rendah bahkan terkesan tidak acuh. Karena waktu mereka lebih banyak dihabiskan di laut; (2) ada sikap yang apatis dari masyarakat terhadap kebijakan dan program baru, karena mereka merasa tidak terlalu bermanfaat untuk mengubah kehidupan sosial ekonominya; (3) Pendidikan masyarakat pulau yang relatif rendah, membuat mereka tidak mudah untuk memahami kebijakan dan program baru; (4) adanya penolakan dari kelompok punggawa, karena mereka merasa terancam eksistensinya pada masyarakat pulau, dan; (5) rendahnya komunikasi yang terjalin antara masyarakat pulau dan pemerintah, menjadi kendala dan hambatan tersendiri.

Pandangan-pandangan ini yang menjadi penilaian masyarakat desa khususnya nelayan di pulau-pulau kota Makassar terkait dengan SDGs desa. Oleh karena itu, agar kebijakan dan program SDGs desa, mampu diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan pada nelayan di pulau-pulau, maka diperlukan adanya strategi edukasi dan penerapan SDGs desa di masyarakat pulau dan pesisir pantai. Antara lain; (1) perlu membangun sinergitas dengan tokoh-tokoh masyarakat di pulau, agar komunikasi dengan masyarakat lebih efisien dan efektif; (2) pemahaman tentang kebijakan SDGs desa, harus diawali dan diberikan kepada tokoh-tokoh kunci pada masyarakat nelayan, sehingga tercipta pemahaman yang sama tentang kebijakan dan program tersebut; (3) perlu mengikutsertakan NGO dan akademisi, sebagai *channeling* (jembatan) untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan program SDGs desa; (5) peran aparatur desa khususnya di pulau-pulau, harus terintegrasi dengan kebijakan dan program SDGs, dan; (6) perlu membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kebijakan dan program SDGs desa, agar masyarakat nelayan baik di pulau maupun dipesisir pantai, memiliki kepercayaan yang tinggi dan mau terlibat dalam SDGs desa tersebut.

Kesimpulan :

Dari pemaparan secara umum dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang melanda nelayan di Indonesia, memerlukan upaya mencari jalan keluar yang efektif dari kondisi tersebut. Apalagi di tengah kondisi pandemic covid-19 sekarang ini, maka keterpurukan sosial ekonomi nelayan khususnya di pulau-pulau kota Makassar makin meningkat.

Kebijakan SDGs desa sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan di desa dan pulau-pulau, secara konseptual dan program sangat baik. Namun, implementasinya memerlukan strategi tersendiri agar tercipta kepercayaan (*trust*) pada masyarakat nelayan sehingga mereka berperan aktif untuk melaksanakan SDGs di wilayahnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Iskandar A. H., 2020. SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Kinseng, R, 2014. *Konflik Nelayan*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Evin, Melvin R, 1977. *Community and Regional Planning; Issues in Public Policy*. USA Preager Publisher New York
- Panulu.S.dan Fitri.M.R, 2016. Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia. Briefing Paper 02 SDGs 1-25, <http://www.sdg2030Indonesia.org/an-component/media/upload-book/briefing>
- Primahendra, R., Martono, Malakias & Nggao, Ferdy S, 2003. *Kemiskinan dan Kemandirian*. Jakarta – Yayasan Bina Swadaya
- Ritzer, G. and Douglas J. G., 2008. *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Satria, A, 2009. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor, IPB Press